
Peran *Ireland Palestine Solidarity Campaign* Terhadap Kebijakan Larangan Impor Produk Israel Tahun 2018*

Fiani Nurmalasari,¹ Ida Susilowati²
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i1.19996](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19996)

Abstract

Violations of Human Rights and International Humanitarian Law of Israel against Palestine have generated a lot of attention from the state and the world community, including Ireland. The existence of historical similarities made Ireland take a stance to support Palestine in gaining independence from Israeli colonization. IPSC (Ireland Palestine Solidarity Campaign) as one of the CSOs (Civil Society Organizations) in Ireland is one of the actors that plays an active role in pressuring the Irish government to pass the Bill on the Prohibition of Importing Israeli Products, namely through the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) movement. Based on this, this study aims to understand the significance of the role of transnational networks carried out by IPSC as CSOs in the study of International Relations in terms of the framework of the Transnational Advocacy Network (TAN) in particular "leverage politics" and "accountability politics". This study applies qualitative methods with analytical descriptive techniques in assessing the sources of research data. The results showed that horizontally, IPSC as a CSO had a positive impact on the creation of awareness of the Irish people to support the Palestinian people's struggle for independence.

Keywords: *Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC), Civil Society Organization (CSO), Transnational Advocacy Network (TAN), Boycott-Divestment and Sanctions (BDS).*

*Diterima: 17 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

¹ **Fiani Nurmalasari** adalah dosen bidang Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia fiani.nurmalasari@unida.gontor.ac.id

² **Ida Susilowati** adalah dosen bidang Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia, idasusilowati@unida.gontor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Irlandia pada dasarnya merupakan sebuah negara yang tergolong netral dalam beberapa konflik, termasuk dalam perang dunia kedua. Dinamika keberpihakan Irlandia dalam konflik Israel-Palestina juga mengalami pasang surut. Dewasa ini, arah diplomasi Pemerintah Irlandia terus berpihak pada Palestina. Sejarah kedekatan hubungan antara Irlandia dan Palestina bermula dari kesamaan sejarah kedua negara dalam mendirikan sebuah negara merdeka. Sebelum mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, rakyat Irlandia terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu kelompok yang ingin memisahkan diri dari Inggris dan kelompok yang ingin bergabung bersama Inggris. Selain itu, konflik sektarian antara warga Irlandia yang menganut agama Katolik dan imigran Inggris yang beragama Kristen Protestan menyebabkan terpisahnya Irlandia Utara dan Republik Irlandia³. Akibatnya, rakyat Irlandia mengalami trauma masa lalu yang menyebabkan mereka bertekad untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan, termasuk diantaranya pendudukan atas tanah Palestina.

IPSC sebagai *Civil Society Organization* (CSO) di Irlandia berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik terkait bagaimana pelanggaran hukum internasional serta sejarah penyebab ketidakadilan yang menimpa rakyat Palestina. Tidak hanya itu, IPSC juga turut mengadvokasi pemerintah Irlandia dan politisi di tingkat lokal, regional Uni Eropa, maupun tingkat internasional. IPSC mewakili Irlandia dalam menyikapi adanya pelanggaran HAM Israel terhadap Palestina. IPSC pun berkomitmen untuk melaksanakan kampanye *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) sejak 2005 silam⁴. Gerakan BDS yang dikoordinir IPSC ini bertujuan untuk menekan pemerintah Irlandia supaya memberlakukan hukum dasar Larangan Impor Produk Israel pada tahun 2018.

Peran IPSC dalam memengaruhi kebijakan RUU Larangan Impor Produk Israel menjadi hal yang menarik untuk dikaji, antara lain karena, *Pertama*, boikot merupakan hal paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu kebebasan rakyat Palestina, salah satunya dengan menahan diri untuk tidak membeli produk Israel. *Kedua*, mayoritas penduduk Irlandia yang menganut Katolik memandang konflik Israel-Palestina sebagai konflik

³ Rizka Maharani, Akim, Windy Dermawan., *Resolusi Konflik Batas Wilayah (Backstop) Irlandia Utara dengan Republik Irlandia dalam British Exit*, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 6.

⁴ IPSC, *Israel 2015: A Government of Extremists in Charge of an-out-of Control Military*, IPSC Briefing Paper, May 2015, h. 39.

pelanggaran HAM. *Ketiga*, IPSC merupakan salah satu aktor CSO yang sangat potensial dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Irlandia -RUU Larangan Impor Produk Israel- melalui aksi *Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)*. *Keempat*, Irlandia dianggap sebagai negara Uni Eropa pertama yang berani memberlakukan boikot terhadap produk-produk Israel⁵ sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Israel⁶. *Kelima*, operasional BDS yang marak terjadi di Eropa dan Amerika cukup membuat Israel merasa cemas karena banyak kehilangan negara pendukungnya. Bahkan Israel menuduh BDS sebagai sebuah sarana propaganda, anti-zionis dan anti-semitis⁷. Dan *keenam*, belum adanya penelitian yang mengkaji implementasi aksi *Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)* dalam peraturan kenegaraan yang dilihat dari sudut pandang respon *Civil Society Organization (CSO)*.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban atas bagaimana peran *Ireland Palestine Solidarity Campaign (IPSC)* sebagai CSO terhadap pengesahan RUU Larangan Impor Irlandia kepada Produk Israel pada tahun 2018. Hal tersebut sebagai implementasi peran CSO sebagai salah satu aktor dalam Hukum Internasional, yang memiliki peran signifikan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, dalam hal ini kebijakan luar negeri pemerintah Irlandia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Jenis penelitian normatif digunakan karena peneliti akan mengkaji peraturan-peraturan yang telah ada yang mempunyai keterkaitan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti tulis dengan didasarkan pada hukum internasional, sedangkan empiris dapat diartikan bersifat nyata, jadi apa yang terjadi atau kenyataan yang terjadi pada sikap politik Ireland atas perilaku yang dianggap bertentangan dengan keadilan universal yaitu penjajahan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Palestina.

⁵ Aqsainstitute, *Irlandia Negara Uni Eropa Pertama Yang Boikot Produk Israel*. Diakses dari <https://aqsainstitute.org> (Kamis, 05/03/2019, 13.01 WIB).

⁶ Muhaim, *Senat Irlandia Setujui Larangan Impor Produk Israel*, diakses dari <https://www.SINDONews.com> (Jum'at, 06/03/20, 15.00 WIB)

⁷ Aqsaworkinggroup, *Tangis Anti-Semitisme: Konferensi di Israel Targetkan BDS*, Diakses dari <https://aqsaworkinggroup.com/berita/tangis-anti-semitisme-konferensi-di-israel-targetkan-bds.html> (Jum'at, 06/03/2019, 14.05 WIB).

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. TAN Sebagai Konsep CSO Dalam Berperan Sebagai Aktor Hukum Internasional

Menurut Keck dan Sikkink, *Transnasional Advocacy Network (TAN)* adalah para aktor yang berkontribusi dalam skala internasional untuk suatu isu. Aktor tersebut telah disatukan oleh nilai-nilai kebersamaan, pertukaran informasi, wacana bersama serta berbagai bantuan. Adapun strategi yang diterapkan TAN adalah melalui: (a) *Informatics Politics*, yaitu kemampuan mengembangkan informasi secara cepat dalam memobilisasi informasi secara politis, (b) *Symbolic Politics*, yaitu kemampuan dalam menggunakan simbol-simbol politik serta mewakili isu yang akan dibawa ke masyarakat transnasional, (c) *Leverage Politics*, atau yakni kemampuan dalam menarik perhatian aktor yang lebih kuat, dan (d) *Accountability Politics*, yakni kemampuan aktor tersebut dalam mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan agar sesuai dengan tujuan jaringan⁸.

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan turunan dari istilah *Non Governmental Organization (NGO)* yang dewasa ini dikenal dengan sebutan *Civil Society Organization (CSO)*. Istilah NGO atau CSO seringkali digunakan baik di ranah internasional maupun nasional, termasuk sebagai identitas pembeda antara lembaga swasta dengan lembaga pemerintah⁹. Peran pemerintah mengalami perkembangan dari hanya sekedar mengatur menjadi ke arah melayani serta memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam jurnal Matharia Putri, Culla menjelaskan tentang konsep perjuangan *Civil Society Organization (CSO)* yang menjadi sebuah wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil suatu negara¹⁰.

⁸ Margareth Keck & Kathryn Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics* (London: Cornell University Press, 1998), h. 9.

⁹ Zuhri Humaidi, *Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Atas Perubahan Paradigmatik Gerakan LSM di Indonesia)*, Jurnal Informasi, Vol. 14, No. 03, 2009, h. 51.

¹⁰ Martharia Putri U.T., *Role of Non Government Organization (NGO) dan Community Based Organization (CBO) dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (Studi pada LSM Damar dan Ormas Aisyiyah Bandar Lampung)*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1, 2014, h. 23.

CSO memiliki karakteristik *autonomy* (kemandirian), *self-generating* (keswadayaan) serta *self-supporting* (keswasembadaan).

Dalam kondisi tertentu, negara sebagai penyelenggara pemerintahan tidak mampu dalam melaksanakan seluruh kewajibannya kepada rakyat. Oleh karena itu, Amy Pollard dan Julius Court mengemukakan 3 tujuan utama sebuah CSO yakni¹¹: (a) *Inspire*, yaitu untuk menginspirasi masyarakat terhadap suatu isu serta mempertanyakan bagaimana kebijakan yang berlaku, (b) *Inform*, yaitu mengemas suatu isu untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat dalam merumuskan solusinya, dan (c) *Improve*, atau melakukan advokasi ataupun lobi terhadap pemerintah untuk mengemukakan solusi permasalahan yang muncul¹². IPSC menerapkan tujuan tersebut guna mendapatkan solusi dari perjuangan penegakkan HAM rakyat Palestina.

Sebagai NGO (Non-Governmental Organization) atau CSO (*Civil Society Organization*), IPSC merupakan lembaga independen yang diresmikan pada tahun 2001 oleh sekelompok aktifis HAM yang peduli pada kondisi wilayah pendudukan di Palestina. Adapun nilai-nilai yang diusung IPSC yakni moral kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi kebebasan rakyat Palestina. Dalam hubungan kerjasama dengan Palestina, IPSC sengaja dibentuk untuk menggalang dukungan rakyat Irlandia terhadap keadilan Palestina. Selain itu, dalam usaha mengakhiri sistem apartheid rasis dan kolonialisme Israel¹³, IPSC memanfaatkan strategi *Leverage Politics* serta *Accountability Politics* guna memberikan tekanan terhadap arah diplomasi Pemerintah Irlandia untuk terus berpihak pada Palestina.

2. Dinamika Hubungan Diplomatik Irlandia, Israel dan Palestina

Dinamika keberpihakan Irlandia dalam konflik Israel-Palestina mengalami pasang surut sebelum dan sesudah terbentuknya negara Israel. Sebelum terbentuknya Israel, Irlandia lebih terlihat berpihak kepada Israel. Sementara setelah kemerdekaan Israel, Irlandia cenderung lebih berpihak kepada Palestina. Dukungan Irlandia terhadap Israel yang terjadi sebelum terbentuknya Israel sekitar tahun 1920-an dan 1930-an lebih berupa dukungan moral dan beberapa koneksi antara Irlandia dengan Israel. Pada hakikatnya,

¹¹ Amy Pollard dan Julius Court, *Working Paper: How Civil Society Organizations Use Evidence Influence Policy Processes: A Literature Review*, Journal Overseas Development Institute, 2005, h. 5.

¹² Martharia Putri U.T, *Op. Cit.*

¹³ IPSC, *Israel 2015: A Government of Extremists in Charge of an-out-of Control Military*, *Op. Cit.* h. 39.

hanya ditemukan dukungan secara langsung yang dilakukan oleh Irlandia kepada Israel, yaitu adanya dukungan politik berupa pengakuan secara *de facto* terhadap Israel pada 12 Februari 1949. Namun secara keseluruhan, tidak ada bantuan dana dan militer yang ditemukan terhadap Israel dari Irlandia¹⁴. Hubungan kedua negara ini mulai tidak harmonis setelah kemerdekaan Israel, Irlandia menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Israel dan lebih menunjukkan keberpihakkannya kepada Palestina.

Alur diplomasi keberpihakan Irlandia terhadap Palestina memiliki keterkaitan dengan sejarah masa lalu Irlandia, yaitu trauma diskriminasi kolonialisme yang dialami Irlandia di masa lampu. Pemerintah Irlandia mengadopsi *Vatikan Factor* atau surat ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Pius XII. Perdana menteri Irlandia, baik John A. Castello maupun Eamon De Valera meyakini bahwa ajaran Katolik tersebut menjadi landasan kebijakan Irlandia¹⁵. Ajaran Paus untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina berdampak besar terhadap kebijakan luar negeri Irlandia dalam menyikapi pelanggaran HAM yang dilakukan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Dinamika hubungan diplomatik antara Irlandia, Israel dan Palestin didasarkan atas dua hal yaitu: *pertama*, tindakan Israel terhadap rakyat Palestina tidak berbeda dengan tindakan kolonial yang sebelumnya pernah menduduki Palestina, yaitu Inggris. Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina seringkali mengingatkan perjuangan rakyat Irlandia melawan pendudukan Inggris¹⁶. Hal tersebutlah yang menyebabkan generasi Irlandia mengambil banyak pelajaran sehingga mereka selalu berusaha agar negara lain tidak merasakan penderitaan yang pernah dirasakan rakyat Irlandia.

Kedua, kelompok nasionalis seperti partai Fianna Fail, Sinn Fein serta Fine Gail sebagai aktor pengambil kebijakan Irlandia tidak bisa dipisahkan dari keyakinan mereka yang menganut Katolik-Roma. Secara tidak langsung, hal tersebut membuat Irlandia memiliki kedekatan tersendiri dengan Vatikan. Oleh karena kedekatan tersebut, pengaruh Katolik dalam konflik Israel-Palestina menjadi sebuah pertimbangan Pemerintah Irlandia dalam menentukan arah

¹⁴ Fauzi Nurul Achyar, *Sikap Irlandia Pasca Kemerdekaan Israel, Studi Kasus: Konflik Israel Palestina Periode 2005-2015*, Journal of International Relations, Vol. 04, No. 02.

¹⁵ Rory Miller, *Why the Irish Support Palestine*, diakses dari <https://foreignpolicy.com/2010/06/23/why-the-irish-support-palestine-2/> pada Rabu (02/09/20, 08:52 WIB).

¹⁶ Rostmaji Kornianan, *Dukungan Irlandia Terhadap Upaya Perdamaian di Palestina* dalam Jurnal ICMES, Vol. 1 No.1, 2017. h. 78.

kebijakan luar negeri Irlandia¹⁷. Seruan *International Character* dan ajaran Paus terkait penegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia telah membawa perubahan sikap dan pemikiran penduduk Irlandia. Oleh karena itu, cara pandang Paus sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di Irlandia telah memengaruhi masyarakat Irlandia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

3. Pengaruh IPSC sebagai *Civil Society Organization* (CSO) di Irlandia

Keberadaan *Civil Society Organization* (CSO) di suatu negara merupakan representasi adanya masyarakat yang berdaulat dan berperan sebagai katalisator dalam menjalani transformasi demokrasi baik melalui pembangunan politik, sosial dan ekonomi. Eksistensi CSO mampu meminimalisir pelanggaran HAM sekaligus sebagai wadah bagi penyaluran aspirasi warga negara¹⁸. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tocci dalam penelitian Carton, bahwa CSO memiliki peranan penting dalam mendukung usaha perdamaian konflik dan memastikan setiap kesepakatan dapat dinegosiasikan oleh para pemimpin politik, supaya diterima dan diimplementasikan di lapangan. CSO juga sebagai agen perubahan yang mampu memberikan dorongan untuk perubahan sosial yang lebih damai¹⁹. CSO hadir sebagai wadah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berpolitik, demi mewujudkan kemaslahatan negara yang lebih baik. *Ireland Palestine Solidarity Campaign* (IPSC) merupakan salah satu CSO yang berfokus di bidang penegakkan HAM rakyat Palestina. IPSC hadir sebagai wadah dalam menghimpun bantuan masyarakat Irlandia mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

IPSC memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan berbagai perusahaan di Irlandia yang berpotensi menyokong kepentingan Israel. IPSC mampu meningkatkan kesadaran rakyat Irlandia untuk turut memperjuangkan penegakkan HAM rakyat Palestina. IPSC menggelar berbagai acara dan kampanye strategis guna meningkatkan dukungan rakyat Irlandia untuk Palestina terutama aksi BDS yang meningkat secara substansial

¹⁷ Nurul Achyar Fauzi, *Sikap Irlandia Pasca Kemerdekaan Israel, Studi Kasus: Konflik Israel Palestina Periode 2005-2015*, Journal of International Relations, Vol. 04, No. 02. h. 7.

¹⁸ Fauzan Ramadhan, *Strategi Kampanye HAM CSO (Studi Kasus Kampanye Kontras dalam Kasus Munir)*, Skripsi Sosiologi, UNJ, 2015, h. 9.

¹⁹ Aimee Louise Carton, *Conflict Transformation and Civil Society in an Ethnic Conflict: The European Union in Northern Ireland and Israel-Palestine*, Political Thesis, University of Amsterdam, 2017, h. 25.

di Irlandia termasuk munculnya gerakan kolektif dari berbagai kalangan dalam memboikot institusi akademik dan mengakhiri berbagai transaksi perusahaan yang berhubungan dengan Israel²⁰. Kampanye BDS yang aktif dilakukan IPSC merupakan salah satu gerakan inklusif serta gerakan anti-rasis yang menentang semua bentuk anti-semitisme, diskriminasi dan islamophobia. Kampanye yang dilakukan IPSC berusaha untuk mengakhiri dukungan internasional terhadap Israel melalui penekanan perusahaan, institusi dan pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka.

Aktifitas BDS di Eropa oleh IPSC diawali dengan aksi terhadap Perusahaan Veolia di Irlandia yang bergerak di bidang industri transportasi asal Prancis yang menyalurkan profitnya untuk Israel²¹. Hal tersebut menjadi titik mula menyebarnya gerakan BDS ke berbagai negara anggota Uni Eropa lainnya, terutama Britannia Raya. Daerah utama yang mengalami keberhasilan kampanye BDS adalah Irlandia, Eropa Barat. Uni Eropa menjadi objek utama pelaksanaan kampanye BDS karena terus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Israel sepanjang tahun 2009-2019 dan dianggap sebagai penyumbang adidaya ekonomi, diplomatik dan politik terhadap Israel yang telah melanggar hukum internasional²².

Irish Trade Union bersama IPSC melaksanakan kampanye atau demonstrasi terhadap perusahaan Veolia semenjak Bulan Agustus 2009. Dengan adanya kampanye terhadap perusahaan asing tersebut, para aktivis IPSC berhasil membatalkan kebijakan kerjasama antara Veolia dengan City Pass²³. Pada tahun 2014, seperti yang dilaporkan oleh media Israel, Maariv menjelaskan bahwa aksi BDS global ini telah menyebabkan kerugian di pihak Israel sebesar 100 juta *shekel* atau sekitar lebih dari US\$30 juta. Tidak hanya itu, website resmi IPSC kemudian menjelaskan bagaimana BDS telah menyebabkan kerugian sekitar lebih dari US\$20 miliar akibat kehilangan kontrak di berbagai negara Eropa termasuk diantaranya Perusahaan Veolia yang berada di Irlandia.

²⁰ BDSmovement, *Union of Student in Ireland Votes to Support Boycott Campaign Against Israel*, dilansir dari <https://bdsmovement.net/news/union-students-ireland-votes-support-boycott-campaign-against-israel> pada Selasa (31-03-2020).

²¹ War on Want, *Boycott, Divestment and Sanction; Winning Justice for the Palestinian People* (London: War on Want Publisher, 2010), h. 19.

²² Anjarwati, Anjarwati, Zulfrida, *Aktivisme Transnasional Gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS) dalam Kampanye Transnasional Derail Veolia/ Alstom tahun 2005-2015*. Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, 2019, h. 9.

²³ IPSC, *Boycott Divestment and Sanctions the Background to Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/bds-the-background> pada Selasa (22-09-20)

Beberapa tahun sebelumnya, sekitar tahun 2010, Perusahaan Amdocs juga pernah mengalami boikot oleh rakyat Irlandia dikarenakan Amdocs terbukti menjadi agen penyokong berbagai kebijakan pendudukan Israel yang telah menewaskan ribuan masyarakat Gaza²⁴. Pemboikotan masyarakat Irlandia terhadap dua perusahaan besar Israel, yaitu Perusahaan Veolia dan Amdocs Boikot cukup berdampak pada pendapatan ekonomi Israel yang sebagian besar digunakan untuk kebijakan memerangi Palestina²⁵.

Besarnya pengaruh BDS yang dikoordinir oleh IPSC, mendorong pemerintah Irlandia untuk melegalisasi larangan impor barang dari daerah pendudukan Israel. Pemerintah Israel pun berusaha melobi pemerintah Irlandia melalui Duta Besar Irlandia, agar tidak memperbesar pengaruh terkait kebijakan RUU tersebut²⁶. Dari lobby tersebut, IPSC masuk daftar *blacklist* kelompok advokasi HAM Palestina, dimana anggotanya dilarang memasuki wilayah Israel dan Palestina²⁷. Hal tersebut menunjukkan bahwa aksi BDS cukup berdampak terhadap perekonomian Israel dan berpeluang dalam mengancam aktivitas pendudukan Israel di Palestina.

4. Strategi Advokasi IPSC melalui *Leverage Politics*

Sebagai aktor TAN, IPSC dituntut untuk dapat menciptakan hubungan dengan aktor-aktor lain yang lebih kuat dan memiliki jaringan yang lebih besar yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dan pengaruh guna memudahkan tercapainya misi utama IPSC sebagai sebuah jaringan. Salah satu barometer utama keberhasilan sebuah jaringan dapat dilihat dari kemampuan jaringan dalam mengubah perilaku dan kebijakan aktor sebagai obyek, baik aktor negara maupun aktor non-negara.

Keberhasilan advokasi mampu mengubah kebijakan aktor yang bergantung pada strategi jaringan, dalam memersuasikan dan menekan aktor

²⁴ Memo Middle East Monitor, *BDS Costs Israel 100 Million Shekels in Losses*, diakses dari <https://www.middleeastmonitor.com/20140412-bds-costs-israel-100-million-shekels-in-losses/> pada Senin (12/10/20).

²⁵ IPSC, *Boycott Divestment and Sanctions the Background to Boycott*, *Op. Cit.*

²⁶ Memo, *Ireland Passes BDS Bill Banning Israel Settlement Goods*, diakses dari <https://www.middleeastmonitor.com/20190125-ireland-passes-bds-bill-banning-israel-settlement-goods/> pada Senin (29-03-2020).

²⁷ Palestine News Network, *IPSC: Israel Blacklist of Human Rights Orgs 'Appalling'*, diakses <http://english.pnn.ps/2018/01/09/ipsc-israel-blacklist-of-human-rights-orgs-appalling/> pada Senin (12/10/20).

untuk merubah kebijakan pemerintahannya. Dalam menunjang perannya sebagai CSO, IPSC melakukan strategi *leverage politics*. Sebagai aktor non-negara, IPSC menggunakan strategi *Transnational Advocacy Network* (TAN) sebagai upaya mengubah kebijakan luar negeri pemerintah Irlandia. Menjalin kerjasama dan relasi dengan ‘aktor berpengaruh’ menjadi jalan alternatif untuk memperoleh pengaruh yang lebih kuat²⁸ dalam menggapai tujuan utama IPSC, yaitu mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Adapun beberapa jaringan IPSC dalam melaksanakan kerjasama penegakkan HAM Palestina, antara lain;

Pertama, BDS National Committee (BNC). Dalam Skala internasional, IPSC bekerjasama dan berkomitmen dengan *BDS National Committee* (BNC) yang berpusat di Palestina dalam usahanya menegakkan HAM di Palestina. IPSC dan *BDS National Committee* (BNC) telah menjadi mitra dalam menyebarkan pendidikan politik melalui kampanye *Boycott, Divestment and Sanctions* (BDS) sejak tahun 2001. Kampanye BDS bertujuan untuk mengajak masyarakat menghentikan dukungan ekonomi terhadap berbagai perusahaan dan lembaga akademik Israel. Gerakan BDS dinilai cukup memengaruhi masyarakat Irlandia untuk turut menentang aneksasi Israel di Palestina. Perlawanan rakyat Palestina terus atas pendudukan Israel di wilayahnya terus berkembang mulai dari perlawanan kekerasan lokal terhadap militer baik menggunakan batu ataupun senjata, hingga aksi boikot tanpa kekerasan yang terus dimarakkan oleh masyarakat internasional di seluruh dunia²⁹.

Kedua, European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP). Aplikasi *leverage politics* terlihat dari keanggotaan IPSC dalam Koordinasi Komite Eropa dan Asosiasi untuk Palestina atau *European Coordination of Committees and Associations for Palestine* (ECCP). Kesamaan tujuan kedua organisasi non-pemerintah tersebut, membuat IPSC turut terlibat jaringan dengan lebih dari 40 komite di Eropa, yang mencakup organisasi, LSM, serikat pekerja dan gerakan solidaritas internasional dari 19 negara-negara Eropa yang memiliki dedikasi penuh dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan dan kesetaraan rakyat Palestina³⁰.

Ketiga, The Irish Network Against Racism atau INAR. IPSC merupakan anggota *the Irish Network Against Racism* atau INAR, sebuah jaringan nasional

²⁸ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Op. Cit.*, h. 18-25.

²⁹ Maira, Sunaina, *Boycott! The Academy and Justice for Palestine* (California: University of California Press, 2018).

³⁰ IPSC, *Arms Embargo European Trade Unions*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/arms-embargo/european-trade-unions-parties-ngos-and-faith-groups-call-on-eu-to-stop-funding-israeli-arms-companies> pada Selasa (22-09-20).

organisasi masyarakat sipil anti-rasisme yang bekerja secara kolektif untuk menyoroti dan menangani masalah rasisme. Komitmen IPSC dalam mendukung hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri menjadi dasar utama perjuangan IPSC untuk turut serta terjun dan membela hak-hak rakyat Palestina. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB no. 3236³¹ tentang hak rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri.

Keempat, Senator Frances Black (Partai Nasionalis Sinn Fein). IPSC berhasil menjaring anggota Parlemen Irlandia Oireachtas untuk bersama-sama mengusung RUU Larangan Impor Produk Israel. IPSC menggandeng Senator Frances Black yang berasal partai nasionalis Sinn Fein³² dalam memperjuangkan RUU Larangan Impor Produk Israel melalui pemungutan suara di Seanad. Frances Black berkedudukan sebagai anggota Panel Industri dan Panel Komersial di Oireachtas sekaligus sebagai delegasi independen Irlandia yang didukung oleh Partai Sinn Fein³³, sehingga dedikasi Black dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina cukup signifikan.

Jalanan kerjasama IPSC dalam usaha menegakkan HAM rakyat Palestina di Irlandia telah mengisyaratkan implementasi strategi *leverage politics*. Keberhasilan yang dilakukan IPSC dalam menyebarluaskan informasi pelaksanaan aksi BDS yang berpotensi besar dalam mengubah opini beberapa anggota parlemen, berpengaruh terhadap implementasi aksi BDS kedalam sebuah perundang-undangan Irlandia tentang larangan import produk-produk Israel.

5. Strategi Advokasi IPSC melalui Accountability Politics

Politik Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan aktor *Transnational Advocacy Network* (TAN) bertujuan untuk membuat aktor yang memiliki pengaruh, bersedia mematuhi prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan aktor TAN. Dalam hal ini, kesesuaian dan ketidaksesuaian

³¹ IPSC, *IPSC Position on Irish Government Recognition of a Palestinian State*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/press-releases/7979> pada Senin (12/10/20).

³² IPSC, *Frances Black Speaking Tour: Ireland Must Act on Palestine (Nov 5-19)*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/irish-government/frances-black-speaking-tour-ireland-must-act-on-palestine> pada Selasa (22-09-20).

³³ Oireachtas, *Frances Black*, diakses dari <https://www.oireachtas.ie/en/members/member/Frances-Black.S.2016-04-25/> Selasa (22-09-20).

komitmen yang dilakukan akan terlihat secara signifikan³⁴. Oleh karena itu, aktor TAN seperti IPSC mencanangkan fungsi pengawasan atas kebijakan Pemerintah Irlandia. Dalam hal ini, IPSC aktif dalam mengirimkan surat masukan kepada Kementerian Luar Negeri Irlandia guna mempertanyakan prinsip dan komitmen pemerintah terkait kebijakan luar negeri pemerintah Irlandia terhadap kasus HAM rakyat Palestina.

Tercatat beberapa *submission letter* yang diajukan IPSC terhadap Pemerintah Irlandia diantaranya, *Pertama "the Praver Plan Expulsion of Arabs from the Naqab"* pada Agustus 2013³⁵. *Kedua, "a Review of Ireland's Foreign Policy and External Relations Approach to the Israeli-Palestinian Conflict"* pada Februari 2014³⁶. *Ketiga, "as Death toll in Gaza Rises to 172, Palestine Campaigners Call on Minister Flanagan to Push for Israel Sanctions"* pada Juli 2014³⁷. *Keempat, "Call for Input on the National Plan on Business and Human Rights"* pada Maret 2015³⁸. *Kelima, "Israel 2015: a Government of Extremists in Charge of an-out-of Control Military"* pada Mei 2015³⁹. *Dan keenam, "EU Guidelines on Labelling of Illegal Settlement Goods Must be Rigorously Enforces, But They are not Enough for EU to Meet its Obligations Under Internastional Law"* pada November 2015⁴⁰.

³⁴ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Op.Cit.*, h. 136.

³⁵ IPSC, *Stop the Praver Plan, Stop the Ethnic Cleansing in the Naqab – IPSC Letter to Minister for Foreign Affairs, Eamonn Gilmore*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/press-releases/stop-the-praver-plan-stop-the-ethnic-cleansing-in-the-naqab-ipsc-letter-to-minister-for-foreign-affairs-eamon-gilmore> pada Senin (12/10/20).

³⁶ IPSC Document, *a Review of Ireland's Foreign Policy and External Relations Approach to the Israeli-Palestinian Conflict*, diakses dari [https://www.ipsc.ie/docs/pdf/\[2014-02-04\]IPSC-ReviewForeignPolicy-Palestine-Israel.pdf](https://www.ipsc.ie/docs/pdf/[2014-02-04]IPSC-ReviewForeignPolicy-Palestine-Israel.pdf) pada Selasa (15/09/20).

³⁷ IPSC Document, *as Death toll in Gaza Rises to 172, Palestine Campaigners Call on Minister Flanagan to Push for Israel Sanctions*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/press-releases/as-death-toll-in-gaza-rises-to-172-palestine-campaigners-call-on-minister-flanagan-to-push-for-israel-sanctions> pada Sabtu (26/09/20).

³⁸ IPSC Document, *Call for Input on the National Plan on Business and Human Rights*, diakses dari <https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/int-priorities/humanrights/nationalplanonbizandhr/Ireland-Palestine-Solidarity-Campaign.pdf> pada Selasa (15/09/20).

³⁹ IPSC, *Israel 2015: a Government of Extremists in Charge of an-out-of Control Military*, *Op. Cit.* h. 2.

⁴⁰ IPSC, *EU Guidelines on Labelling of Illegal Settlement Goods Must be Rigorously Enforces, But They are not Enough for EU to Meet its Obligations Under Internastional Law*, diakses dari <http://www.ipsc.ie/press-releases/eu-guidelines-on-labelling-of-illegal-settlement-goods-must-be-rigorously-enforces-but-they-are-not-enough-for-eu-to-meet-its-obligations-under-international-law> pada Sabtu (26/09/20).

IPSC sebagai aktor transnasional dapat berusaha untuk menegaskan akuntabilitas aktor lain yang dijadikan targetnya, hal tersebut selaras dengan penjelasan Keck dan Sikkink bahwa jaringan transnasional dapat menggunakan posisi dan perolehan informasinya untuk menjembatani antara wacana dengan aplikasi di lapangan⁴¹. Selain itu, IPSC juga meninjau sekaligus menunjukkan adanya perbedaan pada komitmen dengan tindakan Pemerintah Irlandia terkait isu penegakkan HAM Palestina. Aktor jaringan transnasional mencurahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk mengadvokasi dan meyakinkan pemerintah serta aktor terkait dalam mengubah posisi mereka. Setelah pemerintah secara terbuka berkomitmen untuk mendukung prinsip HAM, aktor TAN dapat menggunakan posisi tersebut untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan implementasinya di lapangan. Hal tersebut dilaksanakan agar pemerintah terkait tetap berjalan dalam alur demokrasi dan koridor HAM yang seharusnya⁴².

6. Pengesahan RUU Larangan Impor Produk Israel sebagai Dampak Advokasi IPSC

IPSC bersama *BDS National Committee* berhasil melakukan pendidikan politik masyarakat untuk turut mendukung kebijakan boikot serta menekan senat Irlandia untuk mengesahkan RUU Larangan Impor Produk Israel. Usaha advokasi IPSC melalui strategi *leverage politics* dan *accountability politics* terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Irlandia tidak sia-sia, Pemerintah Irlandia akhirnya mengesahkan kebijakan RUU Larangan Impor Produk Israel pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran IPSC sebagai CSO melalui strategi *Transnational Advocacy Network* (TAN) cukup berhasil.

RUU Larangan Impor Produk Israel ditandatangani oleh *Seanad Civil Engagement Group* yang terdiri dari Senator Alice-Mary Higgins, Lynn Ruane, Grace O'Sullivan, Colette Kelleher dan John Dolan serta Senator David Norris⁴³. RUU tersebut melewati voting pertama di bulan Juli 2018, namun dikembalikan lagi kepada *Seanad Eireann* untuk dilaksanakan musyawarah ulang pada

⁴¹ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*, *Op. Cit.*, h. 95-98.

⁴² Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics* (UK: UNESCO, 1999), h. 98.

⁴³ Senator Frances Black, *Senator Frances Black Tables Occupied Territories Bill 2018*, diakses dari <https://www.francesblack.ie/single-post/settlement-goods> pada Selasa (22-09-20).

November 2018. Setelah menyelesaikan tahap kelima di Senat Irlandia, RUU diajukan ke Dail Eireann sebagai majlis rendah Irlandia dan harus melewati lima putaran perdebatan tambahan sebelum akhirnya presiden menandatangani menjadi undang-undang.

RUU larangan impor produk Israel berisi tentang aturan larangan impor berbagai jenis barang, jasa serta sumber daya alam yang berasal dari pemukiman ilegal di wilayah pendudukan. Pemukiman tersebut merupakan wilayah ilegal dan telah terbukti melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan hukum dasar Irlandia sendiri. RUU tersebut menunjuk secara langsung pada pendudukan secara paksa yang dilakukan Israel di wilayah Palestina yang seringkali berakhir dengan legalisasi oleh PBB, Uni Eropa dan Pemerintah Irlandia sendiri. Senator Frances Black menjelaskan bahwa RUU tersebut merupakan kesempatan bagi Irlandia untuk membela hak orang-orang yang lemah, sebagai upaya menghormati hukum internasional dan menolak pendudukan ilegal yang menyebabkan banyaknya penderitaan manusia. Masyarakat Palestina diusir dari tanahnya dan pengambilan paksa tanah pertanian subur yang mana buah dan sayur tersebut dijual di pasar Irlandia. Banyak masyarakat internasional yang mengecam tindakan Israel, namun mereka tetap mendukung kegiatan perekonomian ilegal melalui penggunaan produk Israel. Dalam Hukum internasional dijelaskan bahwa barang-barang yang dihasilkan dari tanah okupasi merupakan hasil kejahatan, maka jalinan perdagangan yang dilakukan Irlandia dengan Israel harus dihentikan sebagai bentuk pemutusan dukungan Irlandia terhadap Israel⁴⁴.

IPSC berusaha menghentikan kerusakan yang akan timbul jika Pemerintah Irlandia membantu perekonomian Israel, mengingat pendapatan Israel mayoritas digunakan untuk memerangi Palestina. IPSC menyadari bahwa kebebasan berdagang dengan negara lain sangat dianjurkan, namun kebebasan tersebut memiliki batasan. Sebagaimana tujuan IPSC yaitu *human rights must take precedence over trade*⁴⁵, maka IPSC berupaya membangun jaringan advokasi transnasional dalam rangka menekan Pemerintah Irlandia supaya berhenti melakukan hubungan dagang dengan Israel, meskipun hanya sebatas rancangan produk hukum. Hal tersebut cukup memengaruhi aktivis Irlandia untuk Palestina dalam menekan pemerintah Irlandia agar selaras dengan prinsip Konvensi Jenewa menegakkan HAM universal.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ IPSC, *The Importance of Ireland's Role*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/the-issues/ireland> pada Senin (12/10/20).

D. KESIMPULAN

IPSC memiliki pengaruh yang cukup signifikan baik secara horizontal (pengaruh terhadap masyarakat) maupun secara vertikal (pengaruh terhadap pemerintah selaku pemangku kebijakan). Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat Irlandia dalam upaya mendukung kemerdekaan rakyat Palestina melalui boikot produk-produk Israel. Adapun secara vertikal, IPSC mampu menekan kebijakan luar negeri pemerintah Irlandia terhadap RUU Larangan Import produk-produk Israel melalui strategi *Transnational Advocacy Network* (TAN), terutama dalam *Leverage Politics* dan *Accountability Politics*. Dalam strategi *Leverage Politics*, IPSC berupaya mengadvokasi berbagai aktor berpengaruh seperti BDS *National Committee*, ECCP, INAR serta Senator Frances Balck sebagai aktor yang memiliki potensi dalam mengubah kebijakan luar negeri Pemerintah Irlandia agar lebih berorientasi pada Palestina. Sementara dalam strategi *Accountability Politics*, IPSC senantiasa memantau kebijakan luar negeri Irlandia melalui pengiriman surat evaluasi, masukan dan kritikan terhadap Kementerian Perdagangan Luar Negeri Irlandia. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan idealisme demi menjunjung keadilan HAM rakyat Palestina terutama dalam menekan tindakan negara yang cenderung tidak selaras dengan visi misi IPSC. Keberhasilan peran IPSC sebagai CSO dalam menekan Pemerintah Irlandia untuk mengesahkan RUU Larangan Impor Produk Israel tahun 2018, menguatkan bahwa peran masyarakat sipil sebagai subyek hukum internasional cukup signifikan.

REFERENSI:

Buku

Keck, Margareth E & Kathryn Sikkink, *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics* (London: Cornell University Press, 1998).

_____, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics* (UK: UNESCO, 1999).

Maira, Sunaina, *Boycott! The Academy and Justice for Palestine* (California: University of California Press, 2018).

War on Want, *Boycott, Divestment and Sanction; Winning Justice for the Palestinian People* (London: War on Want Publisher, 2010).

Jurnal dan Skripsi

Achyar, Fauzi Nurul, *Sikap Irlandia Pasca Kemerdekaan Israel, Studi Kasus: Konflik Israel Palestina Periode 2005-2015*, *Journal of International Relations*, Vol. 04, No. 02.

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Anjarwati, Zulfrida, *Aktivisme Transnasional Gerakan Boycott, Divestment, Sanction (BDS) dalam Kampanye Transnasional Deraail Veolia/ Alstom tahun 2005-2015*. Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, 2019.
- Carton, Aimee Louise, *Conflict Transformation and Civil Society in an Ethnic Conflict: The European Union in Northern Ireland and Israel-Palestine*, Political Thesis, University of Amsterdam, 2017.
- Fauzi, Nurul Achyar, *Sikap Irlandia Pasca Kemerdekaan Israel, Studi Kasus: Konflik Israel Palestina Periode 2005-2015*, *Journal of International Relations*, Vol. 04, No. 02.
- Humaidi, Zuhri, *Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Atas Perubahan Paradigmatik Gerakan LSM di Indonesia)*, *Jurnal Informasi*, Vol. 14, No. 03, 2009.
- Korniawan, Rostmaji *Dukungan Irlandia Terhadap Upaya Perdamaian di Palestina dalam Jurnal ICMES*, Vol. 1 No.1, 2017.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Maharani, Rizka, Akim, Windy Dermawan., *Resolusi Konflik Batas Wilayah (Backstop) Irlandia Utara dengan Republik Irlandia dalam British Exit*, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Pollard, Amy dan Julius Court, *Working Paper: How Civil Society Organizations Use Evidence Influence Policy Processes: A Literature Review*, *Journal Overseas Development Institute*, 2005.
- Putri, Martharia U.T, *Role of Non Government Organization (NGO) dan Community Based Organization (CBO) dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (Studi pada LSM Damar dan Ormas Aisyiyah Bandar Lampung)*, *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Ramadhan, Fauzan, *Strategi Kampanye HAM CSO (Studi Kasus Kampanye Kontras dalam Kasus Munir)*, Skripsi Sosiologi, UNJ, 2015.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Website dan Report

- Aqsainstitute, *Irelandia Negara Uni Eropa Pertama Yang Boikot Produk Israel*. Diakses dari <https://aqsainstitute.org> (Kamis, 05/03/2019, 13.01 WIB).
- Aqsaworkinggroup, *Tangis Anti-Semitisme: Konferensi di Israel Targetkan BDS*, Diakses dari <https://aqsaworkinggroup.com/berita/tangis-anti-semitisme-konferensi-di-israel-targetkan-bds.html> (Jum'at, 06/03/2019, 14.05 WIB).
- BDSmovement, *Union of Student in Ireland Votes to Support Boycott Campaign Against Israel*, dilansir dari <https://bdsmovement.net/news/union-students-ireland-votes-support-boycott-campaign-against-israel> pada Selasa (31-03-2020).
- IPSC, *Israel 2015: A Government of Extremists in Charge of an-out-of Control Military*, IPSC Briefing Paper, May 2015.
- _____, *Boycott Divestment and Sanctions the Background to Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/bds-the-background> pada Selasa (22-09-20).
- _____, *Arms Embargo European Trade Unions*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/arms-embargo/european-trade-unions-parties-ngos-and-faith-groups-call-on-eu-to-stop-funding-israeli-arms-companies> pada Selasa (22-09-20).
- _____, *IPSC Position on Irish Government Recognition of a Palestinian State*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/press-releases/7979> pada Senin (12/10/20).
- _____, *Frances Black Speaking Tour: Ireland Must Act on Palestine (Nov 5-19)*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/irish-government/frances-black-speaking-tour-ireland-must-act-on-palestine> pada Selasa (22-09-20).
- _____, *Stop the Praver Plan, Stop the Ethnic Cleansing in the Naqab – IPSC Letter to Minister for Foreign Affairs, Eamonn Gilmore*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/press-releases/stop-the-praver-plan-stop-the-ethnic-cleansing-in-the-naqab-ipsc-letter-to-minister-for-foreign-affairs-eamon-gilmore> pada Senin (12/10/20).
- _____, *a Review of Ireland's Foreign Policy and External Relations Approach to the Israeli-Palestinian Conflict*, diakses dari [https://www.ipsc.ie/docs/pdf/\[2014-02-04\]IPSC-ReviewForeignPolicy-Palestine-Israel.pdf](https://www.ipsc.ie/docs/pdf/[2014-02-04]IPSC-ReviewForeignPolicy-Palestine-Israel.pdf) pada Selasa (15/09/20).
- _____, *as Death toll in Gaza Rises to 172, Palestine Campaigners Call on Minister Flanagan to Push for Israel Sanctions*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/press-releases/as-death-toll-in-gaza-rises-to-172-palestine-campaigners-call-on-minister-flanagan-to-push-for-israel-sanctions> pada Sabtu (26/09/20).

- _____, *Call for Input on the National Plan on Business and Human Rights*, diakses dari <https://www.dfa.ie/media/dfa/alldfawebsitemedia/ourrolesandpolicies/int-priorities/humanrights/nationalplanonbizandhr/Ireland-Palestine-Solidarity-Campaign.pdf> pada Selasa (15/09/20).
- _____, *EU Guidelines on Labelling of Illegal Settlement Goods Must be Rigorously Enforced, But They are not Enough for EU to Meet its Obligations Under International Law*, diakses dari <http://www.ipsc.ie/press-releases/eu-guidelines-on-labelling-of-illegal-settlement-goods-must-be-rigorously-enforced-but-they-are-not-enough-for-eu-to-meet-its-obligations-under-international-law> pada Sabtu (26/09/20).
- _____, *The Importance of Ireland's Role*, diakses dari <https://www.ipsc.ie/the-issues/ireland> pada Senin (12/10/20).
- Memo, *Ireland Passes BDS Bill Banning Israel Settlement Goods*, diakses dari <https://www.middleeastmonitor.com/20190125-ireland-passes-bds-bill-banning-israel-settlement-goods/> pada Senin (29-03-2020).
- Memo Middle East Monitor, *BDS Costs Israel 100 Million Shekels in Losses*, diakses dari <https://www.middleeastmonitor.com/20140412-bds-costs-israel-100-million-shekels-in-losses/> pada Senin (12/10/20)..
- Miller, Rory, *Why the Irish Support Palestine*, diakses dari <https://foreignpolicy.com/2010/06/23/why-the-irish-support-palestine-2/> pada Rabu (02/09/20, 08:52 WIB).
- Muhaim, *Senat Irlandia Setujui Larangan Impor Produk Israel*, diakses dari <https://www.SINDONews.com> (Jum'at, 06/03/20, 15.00 WIB).
- Oireachtas, *Frances Black*, diakses dari <https://www.oireachtas.ie/en/members/member/Frances-Black.S.2016-04-25/> Selasa (22-09-20).
- Palestine News Network, *IPSC: Israel Blacklist of Human Rights Orgs 'Appalling'*, diakses <http://english.pnn.ps/2018/01/09/ipsc-israel-blacklist-of-human-rights-orgs-appalling/> pada Senin (12/10/20).
- Senator Frances Black, *Senator Frances Black Tables Occupied Territories Bill 2018*, diakses dari <https://www.francesblack.ie/single-post/settlement-goods> pada Selasa (22-09-20).